DINKES
Dinas Kesehatan Kota Semarang

semarang
simpul ekonomi jawa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2023

dkksemarang
dinkes.semarangkota.or.id
(024) 8415269 - 8318070
JL. PANDANARAN NO. 79 KODE POS 50134 SEMARANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas pencapaian kinerja dan tindak lanjut atas pelaksanaan rencana kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan merupakan pengaplikasian Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini, dan kami menyadari bahwa dalam LKJIP Dinas Kesehatan Kota Semarang ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa LKJIP tahun 2023 ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan visi Kota Semarang Tahun 2021-2024 yaitu **"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalan Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika"**

Semarang, Maret 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN

MOCHAMAD ABDUL HAKAM

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 3

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5

C. Permasalahan Utama 7

D. Sistematika Laporan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026 9

B. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 2022-2026 13

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 14

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 18

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 18
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu 19
3. Perbandingan Realisasi kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi 31
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 31
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran 33
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39
7. Analisi Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 40

B. Realisasi Anggaran 44

BAB IV PENUTUP 52

A. Kesimpulan 52

B. Upaya Perbaikan 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemapuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2002 pasal 28 H dan pasal 34 serta Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang masuk dalam urusan wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan didukung oleh letak Kota Semarang sebagai jalur utama diantara kota – kota besar di pulau Jawa, membuat Kota Semarang rawan terhadap penyakit yang dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat serta tidak mengenal batas wilayah administrasi. Selanjutnya berbagai penyakit baru ”*New emerging diseases*” ditemukan, serta kecenderungan meningkatnya kembali beberapa penyakit yang selama ini sudah berhasil dikendalikan ”*re – emerging diseases*”.

Amanat pelaksanaan pembangunan kesehatan dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional (NAWACITA), dimana pembangunan kesehatan itu masuk dalam point “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Sedangkan pembangunan kesehatan di Kota Semarang, dalam RPJMD 2016-2021 diarahkan untuk mendukung misi Walikota Semarang yaitu misi pertama : **”Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan & Keadilan Sosial.”**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), penyusunan LKj-IP merupakan

bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki acuan pembangunan kesehatan konsep paradigma Semarang Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan / pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republikasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategi (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomir 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah OPD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Akhir tahun 2021 telah ditetapkan perubahan struktur organisasi dengan ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sesuai dengan Perwal tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut;

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2016 ditetapkan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Semarang yang dilakukan atas dasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan struktur organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. Rumah Sakit Daerah;
h. Puskesmas;
i. UPTD;
j. Jabatan Fungsional.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan struktur organiasasi Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut :

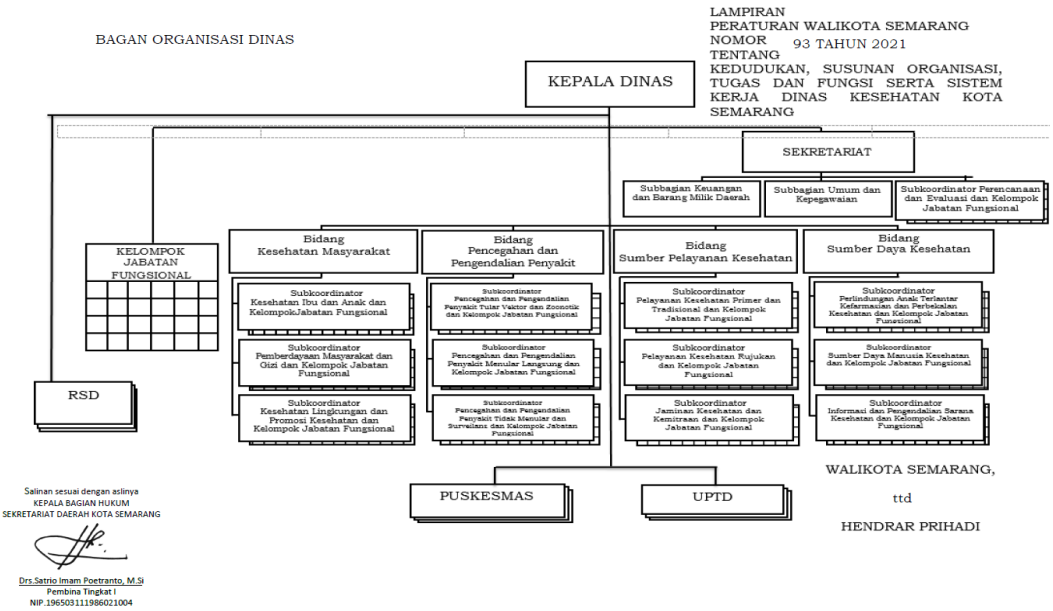

C. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Pada Tahun 2023 yaitu:

1. Perubahan masalah kesehatan ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk (transisi demografi), transisi epidemiologi dan transisi resiko akibat perubahan pola hidup, peningkatan usia harapan hidup dan perubahan iklim;
2. Triple burden malnutrition yaitu undernutrition (stunting dan wasting), overnutrition (obesitas usia diatas 18 tahun) dan micronutrient deficiency (anemi dan KEK pada ibu hamil);
3. Penguatan upaya bergerak bersama dengan pelibatan swasta, institusi pendidikan, kader kesehatan dalam menghadapi issue/ masalah kesehatan masyarakat yang berfokus pada upaya promotive preventif dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi kesehatan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta pemasalahan umum (*strategic issued)* yang sedang di hadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja dan rencana kerja dan anggaran serta di uraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan analisi capaian kinerja yang telah diperjanjian pada tahun 2022.

Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja berikutnya.

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Semarang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 memuat Visi pembangunan Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu :

Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial

Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila

Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota

Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 mendukung visi misi Walikota dam Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan” .

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kota Semarang merumuskan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (accessible);
2. Meningkatkan kapasitas (ketersediaan) sumber daya kesehatan;

3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam Kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Untuk mencapai keempat sasaran strategis tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukan tingkat perioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan lima tahun yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Perumusan tujuan ini merupakan salah satu tahapan perumusan kebijakan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan Renstra. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	**Sasaran 1:** Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau (*affordable)*, dan bermutu	Peningkatan upaya Kesehatan secara terpadu	1. Optimalisasi upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat 2. Pengembangan jaminan Kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin 3. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi 5. Perbaikan gizi masyarakat
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ tidak menular melalui surveilan kesehatan

Visi : Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas sumberdaya Kesehatan	Peningkatan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan industri pangan rumah tangga	Peningkatan mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan industri pangan rumah tangga sesuai standar
		Peningkatan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan
	Sasaran 3 : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam Kesehatan	Peningkatan pemberdayaan bidang Kesehatan masyarakat	Peningkatan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat
	Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Peningkatan pelayanan kinerja dan keuangan

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2016

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/ sasaran	Satuan	Target Capaian				Target Akhir Periode Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4				5
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,22	77,23	77,24	77,25	77,26
Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Ibu	per 1000 KH	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	71,34	71,33	71,32	71,31	71,30
	Angka Morbiditas	per 1000 penduduk	11,71	11,21	10,71	10,21	9,71
Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	per 1000 penduduk	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100
Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	Persentase	22,00	22,60	23,16	23,73	24,30
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,40	72,45	72,50	72,55	72,60

Sumber data: Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2026

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio daya tamping rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,36%	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	84,38%	90,6%	93,7%	96,8%	100%
3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase usia lansia yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase orang terduga tuberculosis mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus (HIV)* mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
15	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	71,34	71,33	71,32	71,31	71,30
16	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04
17	Angka kematian balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup	7,00	6,90	6,88	6,86	6,84

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Bentuk upaya untuk mewujudkan target kinerja tahunan Dinas Kesehatan tertuang dalam perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
MISI I. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL				
1	Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu	1	Angka Kematian Bayi	6,07 per 1000 KH
		2	Angka Kematian Ibu	71,33 per 100.000KH
		3	Angka Morbiditas	11,70 per 1000
2	Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	1	Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	40%
		2	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	1,37 per 1000 penduduk
3	Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	1	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	48,59% %
4	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1	NILAI AKIP	72,45

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 yang terdiri atas 5 (lima) program sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN		KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	291,166,249,644	APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	152,094,642,323	APBD/Dana Transfer
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1,485,198,133	APBD/Dana Transfer
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	580,319,892	APBD/Dana Transfer
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	888,412,565	APBD/Dana Transfer
	JUMLAH	**Rp.**	**465,984,293,557**	

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini diarahkan pada pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara teadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi (kemampuan) individu untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia dalam sektor kesehatan merupakan aspek yang penting karena merupakan input (masukan) dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini diarahkan pada pengelolaan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman industri rumah tangga. Perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai perlu memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan serta memanfaatkan sumber daya melalui program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Tabel. Matriks Perencanaan Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	77,38	77,40	77,42	77,44	77,46
Sasaran I : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau (*affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04
	Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	71,34	71,33	71,32	71,31	71,30
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	11,71	11,21	10,71	10,21	9,71
Sasaran II : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	100	100	100
Sasaran III : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri [persentase]	22,00	22,60	23,16	23,73	24,30

Tujuan/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran IV : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP [Nilai]	72,40	72,45	72,50	72,55	72,60

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Semarang menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. LKj-IP Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 menyajikan capaian setiap sasaran dan capaian kinerja kegiatan.

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance Plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui gap kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang sebagai berikut :

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi ini menjelaskan capaian kinerja secara umum berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Sasaran strategis yang terkait ini digabungkan dalam satu analisis. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasinya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Ringkasan capaian kinerja pada indikator kinerja utama yang merupakan hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			KRITERIA
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sasaran I : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau (*affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	71,33	79,85	88,01	Tinggi
	Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	6,07	7,09	83,20	Tinggi
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,70	12,69	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			KRITERIA
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sasaran II : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,37	1,36	99,27	Sangat Tinggi
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	100	Sangat Tinggi
Sasaran III : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri [persentase]	48,59	66,10	136,04	Sangat Tinggi
Sasaran IV : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP [Nilai]	72,45	78,65	108,56	Sangat Tinggi

Hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagian besar realisasi kinerja telah sesuai ataupun melebihi dari target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator, dengan skala pengukuran realisasi kinerja rata-rata termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Terdapat tiga indikator yang tidak memenuhi target yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu menjadi semakin penting untuk membantu Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam membuat kebijakan yang tepat dalam penyusunan program/kegiatan periode selanjutnya.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				REALISASI	REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	KRITERIA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	71,33	79,85	88,01	Tinggi	95,3	67,25
2	Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	6,07	7,09	83,20	Tinggi	6,04	5,6
3	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,70	12,69	100	Sangat Tinggi	-	11,65
4	Rasio tenaga Kesehatan	1,37	1,36	99,27	Sangat Tinggi	-	2,60

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				REALISASI	REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	KRITERIA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]						
5	Proporsi pelayanan kefarmasian dipuskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
6	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri [persentase]	48,59	66,10	136,04	Sangat Tinggi	45,91	56,5
7	Nilai AKIP [Nilai]	72,45	78,65	108,56	Sangat Tinggi	74,01	74,01

ANGKA KEMATIAN IBU

Tahun 2023 jumlah kematian ibu maternal di Kota Semarang meningkat 1 (satu) kasus dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 16 kasus kematian ibu. Angka kematian ibu di tahun 2023 sebesar 79,8 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian ibu lebih dari setengahnya (68%) terjadi pada masa nifas dengan 11 kasus dan 5 kasus (32%) terjadi pada masa kehamilan. Penyebab kematian ibu 37% atau sebesar 6 kasus perdarahan disebabkan syok hipovolemik, 26% terjadi eklampsi. 1 kasus ibu mengalami sepsis dan 31% atau sebanyak 5 kasus penyebab lainnya seperti oedem pulmo, emboli dan cardiact arrest.

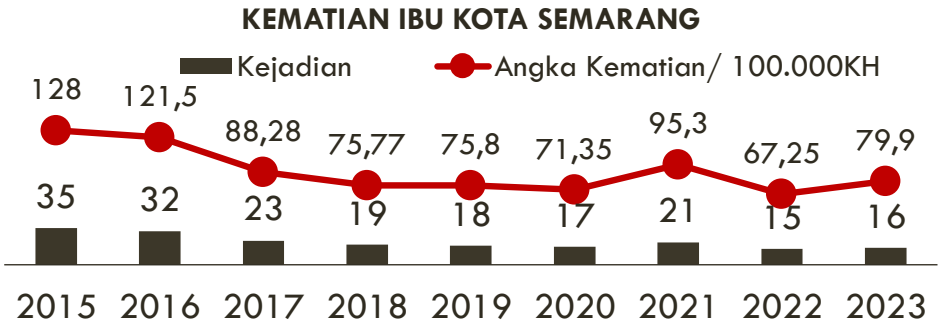

Sumber data : Transformasi Kesehatan Bidang Kesmas Dinkes Kota Semarang

ANGKA KEMATIAN BAYI

Kematian bayi pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Tahun 2022 terdapat 125 kasus kematian bayi, di tahun 2023 meningkat menjadi 142 kasus

kematian bayi, dimana 15% atau 20 bayi meninggal diluar Kota Semarang, KTP Ibu Semarang namun domisili ibu juga diluar Kota Semarang. Lebih dari setengahnya (61%) bayi tersebut dilahirkan dari ibu hamil beresiko. Penyebab kematian bayi di tahun 2023 sebanyak 34% atau 48 kasus kematian karena bayi prematur/BBLR, memiliki kelainan bawaan (33 kasus), asfiksia (28 kasus), 17% atau 34 kasus disebabkan karena elektrolit balance, blood coagulation disorder, neonatal seixure, perdarahan intrakranial, aspirasi, syok hipovolemik dan gagal nafas, 3% karena sepsis, 3% pneumonia, dan 1% disebabkan dengue shock syndrome.

Tahun 2023 jumlah kelahiran hidup di Kota Semarang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran hidup di tahun 2022 sebanyak 22.304 sedangkan di tahun 2023 sebanyak 20.047 kelahiran hidup, hal ini disebabkan karena:

1. Keberhasilan KB yang berdampak menurunnya kelahiran hidup;
2. Dampak perubahan iklim (elnino) menyebabkan pre eklampsia, berat badan bayi lahir rendah, premature sehingga beresiko menyebabkan kematian bayi maupun ibu;
3. Perubahan gaya hidup (perilaku) menyebabkan jumlah ibu hamil usia kurang dari 20 tahun meningkat hal ini merupakan bumil beresiko tinggi;
4. Transisi demografi mengacu tingkat kelahiran dan kematian mempengaruhi komposisi penduduk. Angka mortalitas lebih tinggi dibandingkan angka fertilitas, maka akan beengaruh negatif terhadap demografi.

ANGKA DAN JUMLAH KEMATIAN BAYI
KOTA SEMARANG TAHUN 2015 - 2023

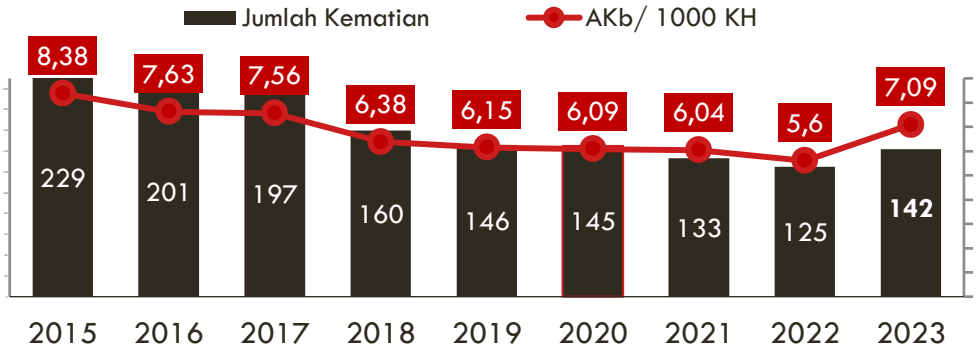

Penurunan tingkat kelahiran (*fertility rate),* jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan selama masa reproduksi. Penurunan tingkat kelahiran yang terjadi bersamaan dengan peningkatan usia harapan hidup akan berdampak pada bertambahnya populasi usia tua. Tiga faktor yang mempengaruhi *fertilitas* (John Aitken Universitas of Newcastle Australia) yaitu : sosial-edukasi, lingkungan-gaya hidup dan evolusi.

Proyeksi penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2010-2035, angka kelahiran terus menunjukkan penurunan hingga menjadi 4,29 juta jiwa pada 2035. Sebaliknya, angka kematian mengalami tren kenaikan hingga mencapai 2,68 jiwa pada 2035.

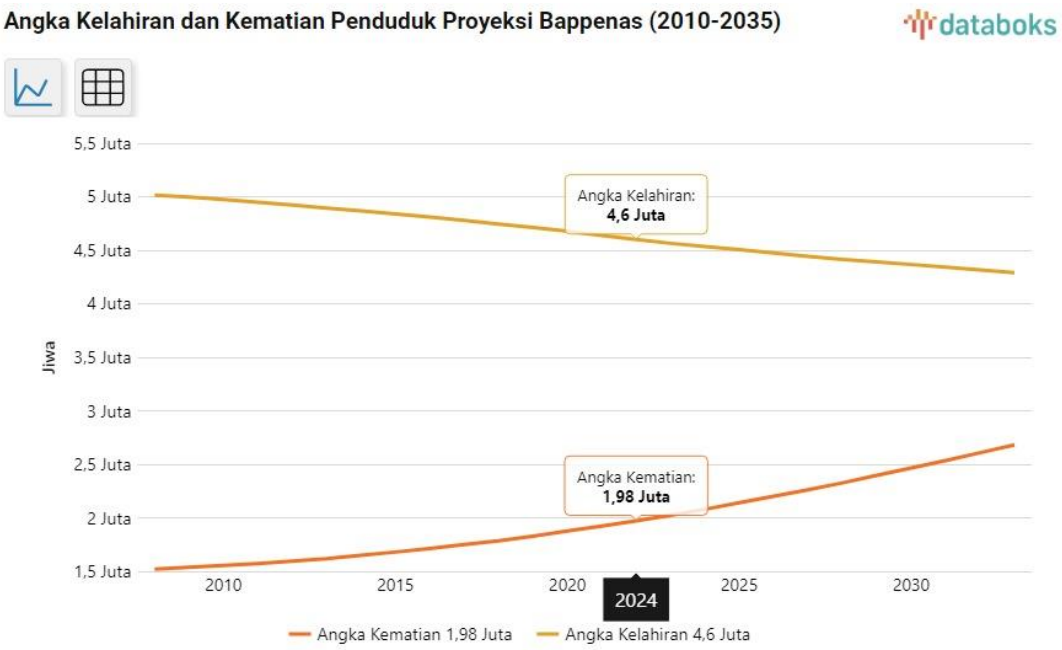

Sumber data : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/20/2010-2035-angka-kelahiran-turun-sedangkan-angka kematian-naik

Kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB), yakni dengan menunda usia pernikahan, mengatur jarak kelahiran anak, serta membatasi jumlah anak membuat angka kelahiran bayi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara angka kematian justru terlihat meningkat seiring makin banyaknya penduduk lanjut usia yang tutup usia.

Angka Mobiditas

Penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 dan tahun 2023. Menurut survei *Institute for*

Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2019, penyakit pernapasan masuk dalam 10 penyakit terbanyak yang terjadi di Indonesia. Bahkan, penurunan kualitas udara dinyatakan sebagai faktor risiko kematian kelima tertinggi di Indonesia, setelah hipertensi, gula darah tinggi, merokok, dan obesitas.

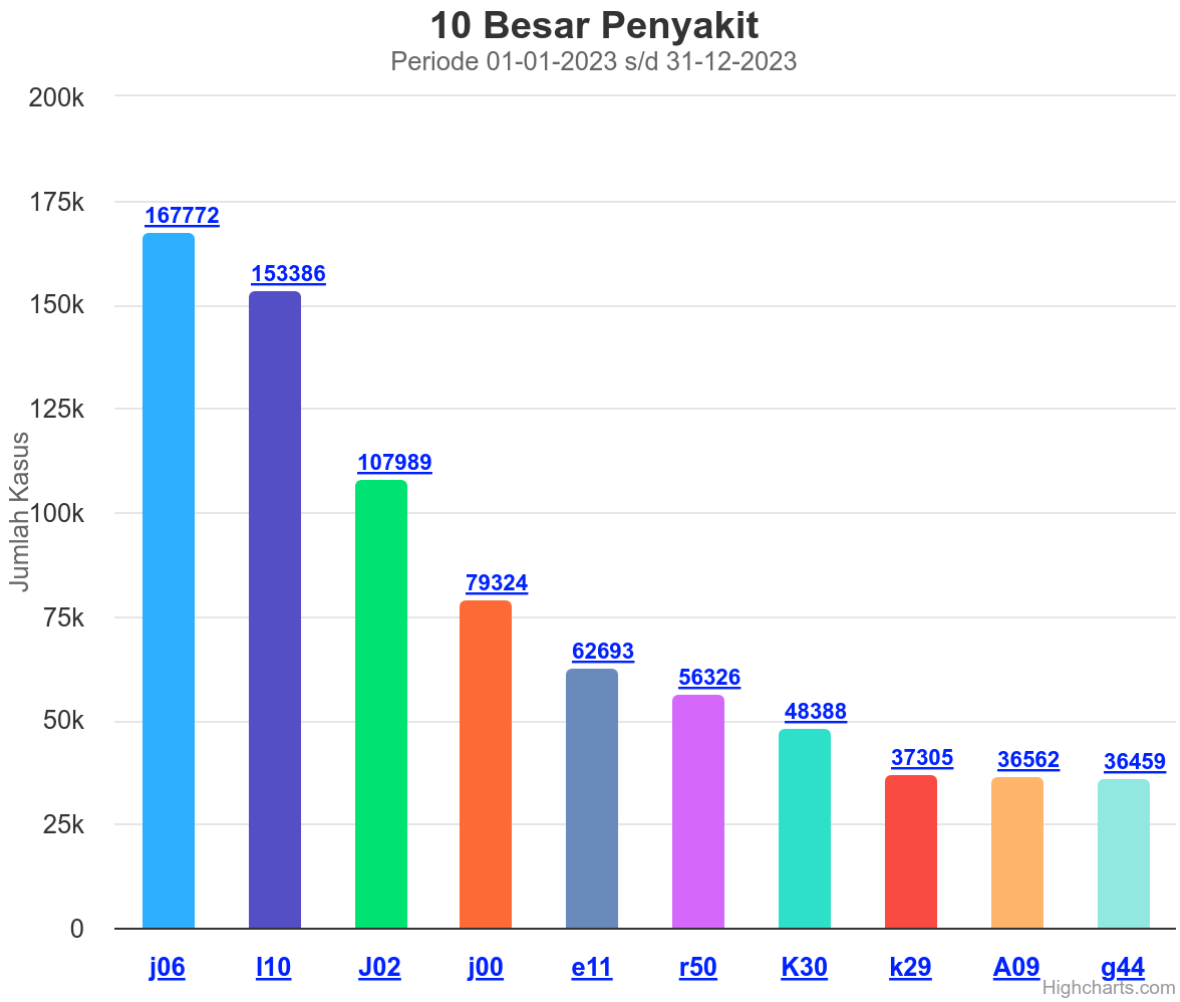

Sumber data : dashboard LEKMINKES Dinas Kesehatan Kota Semarang

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan masalah terbanyak yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2023 yang membuat masyarakat berkunjung di puskesmas. ISPA merupakan salah satu penyakit pernapasan yang umum terjadi di Indonesia. Istilah medis ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas dan bawah, termasuk hidung, tenggorokan, sinus, bronkus, dan paru-paru. Infeksi saluran pernapasan akut bisa disebabkan oleh berbagai agen penyebab, seperti virus, bakteri, atau bahkan jamur.

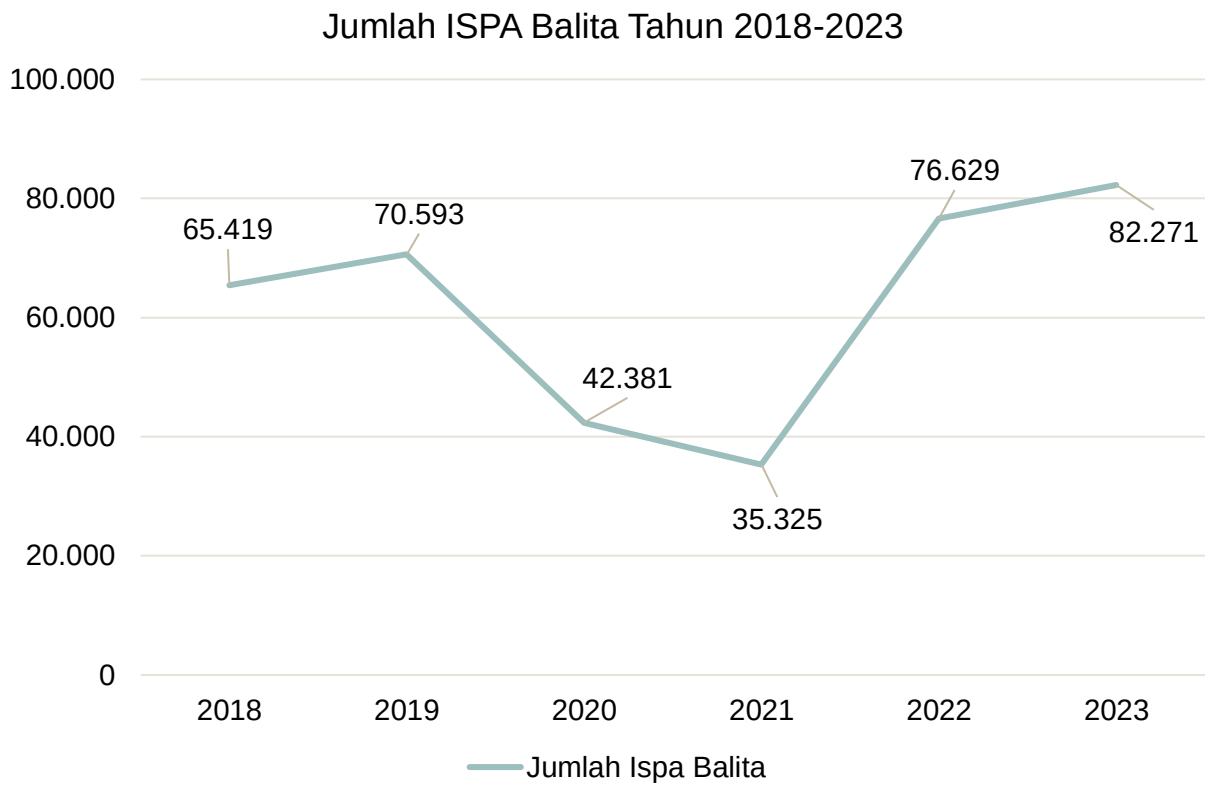

Sumber data : Transformasi Kesehatan Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2023

Dampak buruk dari penurunan kualitas udara sangat jelas. Terutama yang tinggal di perkotaan, berisiko lebih tinggi terkena ISPA karena paparan polusi udara. Partikel-partikel berbahaya seperti debu halus, asap kendaraan bermotor, dan polusi industri dapat merusak saluran pernapasan dan memicu infeksi.

Hipertensi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kota Semarang pada tahun 2023. Hipertensi (tekanan darah tinggi) terjadi ketika tekanan di pembuluh darah terlalu tinggi (140/90 mmHg atau lebih tinggi). Hal ini biasa terjadi tetapi bisa menjadi serius jika tidak diobati. Hal-hal yang meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi antara lain:

- Usia yang lebih tua
- Genetika
- Kelebihan berat badan atau obesitas
- Tidak aktif secara fisik
- Diet tinggi garam
- Minum terlalu banyak alkohol

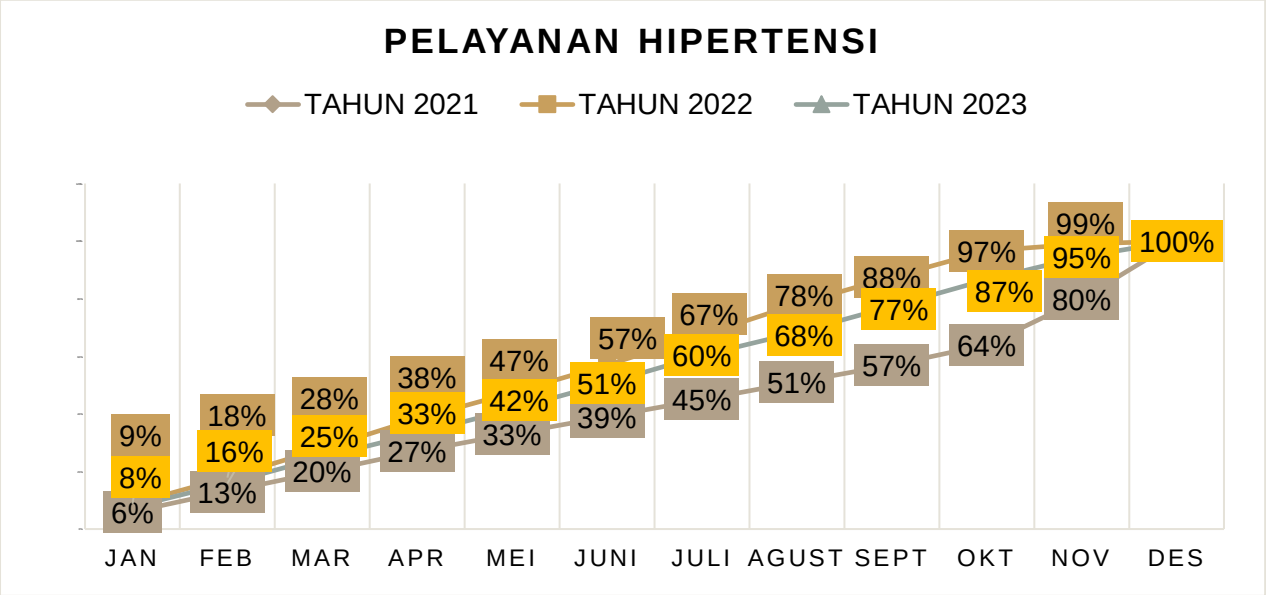

Intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak hipertensi dengan cara :

1. Modifikasi pola makan dengan mengurangi asupan garam <6gr per hari serta meningkatkan asupan sayur/buah
2. Menyesuaikan berat badan ideal sesuai dengan analisa IMT (BB/TB^2)
3. Mengagendakan aktivitas fisik seperti dengan latihan aerobik ringan selama 30 menit/hari atau 210 menit/minggu
4. Berhenti merokok dan atau hindari asap rokok bagi yang tidak merokok
5. Bagi penderita, rutin meminum obat hipertensi dan cek tekanan darah setiap bulan di Puskesmas atau Posbindu
6. Mengedukasi dan mengajak anggota keluarga untuk menerapkan GERMAS dirumah;

Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk untuk menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kelompok masyarakat di puskesmas.

Rasio Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2023

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	RASIO
1	DOKTER	206	0,12
2	DOKTER GIGI	68	0,04
3	PERAWAT	803	0,47
4	BIDAN	430	0,25
5	KESMAS	146	0,09
6	SANITARIAN	61	0,04

7	TENAGA GIZI	125	0,07
8	ATLM	153	0,09
9	APOTEKER	297	0,18
TOTAL		**2.289**	**1,36**

Sumber data : Seksi SDMK Dinas Kesehatan Kota Semarang

Rasio dokter per 1.000 penduduk tahun 2023 sebesar 0,12 artinya Kota Semarang memiliki 1 (satu) dokter puskesmas yang akan melayani 10.000 penduduk. Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 sebanyak 1.688.981 penduduk. Menurut WHO rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Rasio ini menunjukkan harus ada 1 dokter untuk melayani 1000 penduduk di suatu daerah.

Rasio perawat per 1.000 penduduk tahun 2023 sebesar 0,47. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar rasio 0,473. Artinya 5 perawat di Kota Semarang melayani 10.000 penduduknya.

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar:

a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan

b. pelayanan farmasi klinik

Perbandingan realisasi proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas tahun 2023 dengan target tahun 2023, realisasi tahun 2022 dan target di tahun akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2026 (akhir renstra)
100%	100% (Sangat Tinggi)	100% (Sangat Tinggi)	100%

Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Semarang menggunakan indikator persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar untuk mengukur pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang diselenggarakan di sarana kesehatan yaitu meliputi Instalasi

Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Kelas C, D dan khusus), Ruang Obat Puskesmas, Ruang Obat Klinik, Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.

Pencapaian kinerja tahun 2023 terhadap pelayanan kefarmasian di saran kesehatan telah memenuhi target 40% dari sarana kesehatan yang ada di Kota Semarang. Sarana kesehatan yang tersedia sebanyak 317 sarana kesehatan.

PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI STANDAR

Bulan	Instalasi farmasi	Instalasi farmasi RS	Ruang obat puskesmas	Ruang obat klinik	apotek	Toko alkes	Yanfar toko obat	total	kumulatif
Jan	0	0	3	1	5	0	0	9	9
Feb	0	1	4	1	5	2	1	14	23
Mar	0	1	3	1	5	2	1	13	36
Apr	0	1	3	1	5	0	0	10	46
May	0	1	3	1	5	0	0	10	56
Jun	0	1	3	1	5	1	1	12	68
Jul	0	1	3	1	5	1	1	12	80
Aug	0	1	3	1	5	1	0	11	91
Sep	1	1	3	1	5	2	0	13	104
Okt	0	1	3	1	5	1	0	11	115
Nov	0	1	3	1	5	2	0	12	127
Des	0	0	3	1	5	2	0	11	138
TOTAL	**1**	**10**	**37**	**12**	**60**	**14**	**4**	**1**	**138**

Sumber Data : Dashboard LEKMINKES Dinas Kesehatan Kota Semarang

Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat banyak, meliputi diagnosa, profilaksi terapi dan rehabilitasi dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri. Ketersediaan obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, oleh karena itu obat harus selalu tersedia setiap saat baik dalam jenis dan jumlah yang cukup.

Ketersediaan 40 item obat indikator di Puskesmas berpedoman pada Permenkes RI No 21 Tahun 2020

NO	KETERSEDIAAN OBAT	ITEM OBAT
1.	Obat program kesehatan ibu dan anak	• MgSO4 • Metilergometrin • Oksitosin inj • Vit. K inj
2.	Obat program gizi	• Retinol • Zinc • Garam oralit • TTD
3.	Obat program Malaria	• DHP, Primakuin
4.	Obat program filariasis	• Albendazol/pirantel pamoat
5.	Obat program TB	• RIFASTAR 4 FDC
6.	Vaksin	• Hepatitis B • BCG • DPT-HB-Hib • Polio • Campak/ • Campak Rubella
7.	Obat Esensial	• Obat pelayanan kesehatan dasar

Pemilihan obat di puskesmas mengacu pada formularium nasional (FORNAS) KMK RI No. HK.01.07/MENKES/6485/2021 dan Formularium Obat PKD Kota Semarang SK Kadinkes No.442/0750/2022. Jumlah jenis obat PKD sebanyak 107 item obat.

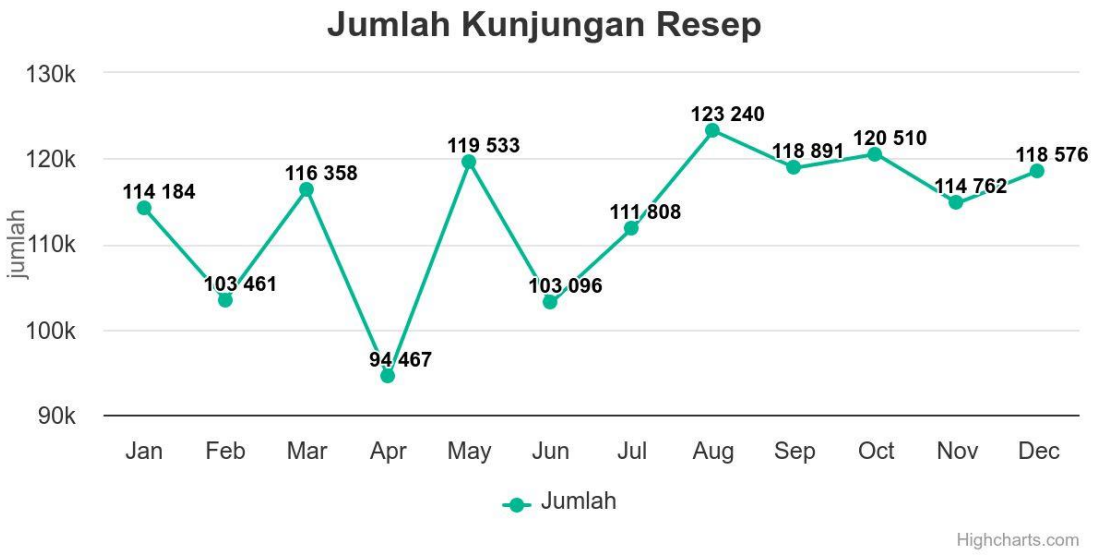

Sumber Data : Dashboard LEKMINKES Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023

Banyaknya jumlah kunjungan dan resep yang dilayani dapat berpengaruh kepada kualitas pelayanan kefarmasian, khususnya pelayanan.

Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

Kelurahan siaga aktif terbagi menjadi 4 strata pratama, madya,purnama dan mandiri terhadap jumlah kelurahan di Kota Semarang. Kota Semarang menggunakan 9 indikator/ kriteria instrumen penilaian strata kelurahan siaga aktif, yaitu :

1. Forum Kesehatan Desa/ kelurahan (FKD/FKK);
2. Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK;
3. KPM/ Kader Kesehatan;
4. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar (di FKTP, jaringan dan jaringannya);
5. Posyandu dan UKBM lainnya aktif;
6. Dukungan dana untuk kegiatan Kesehatan di desa/kelurahan;
7. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
8. Kebijakan desa/ kelurahan dibidang Kesehatan;
9. Pencapaian rumah tangga.

Perhitungan Stratafikasi Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan skoring adalah

1. Strata Pratama : skor 9-13
2. Strata Madya : skor 14-23
3. Strata Purnama : skor 24-31
4. Strata Mandiri : skor 32-36

STRATA MANDIRI Skor 32 - 36, dengan syarat :

- Indikator 1 yaitu Forum Kesehatan Desa/kel (FKD/FKK) mencapai skor 4
- Indikator 2 yaitu Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK mencapai skor 4
- Indikator 8 yaitu Kebijakan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan mencapai skor 4
- Indikator 9 yaitu Pencapaian Rumah Tangga Sehat lebih dari 70% mencapai skor 4

Jika 4 indikator/variabel tersebut belum memenuhi skore 4, artinya meskipun jumlah skore sudah mencapai range 32-36 dinilai belum mencapai Strata Mandiri tapi masih di Strata Purnama.

Perbandingan realisasi kelurahan siaga aktif mandiri tahun 2023 dengan target tahun 2023, realisasi tahun 2022 dan target di tahun akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Proporsi Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2026 (akhir renstra)
48,59%	66,10%	56,5%	24,3%

Tahun 2023 tercapai 117 kelurahan siaga mandiri dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang.

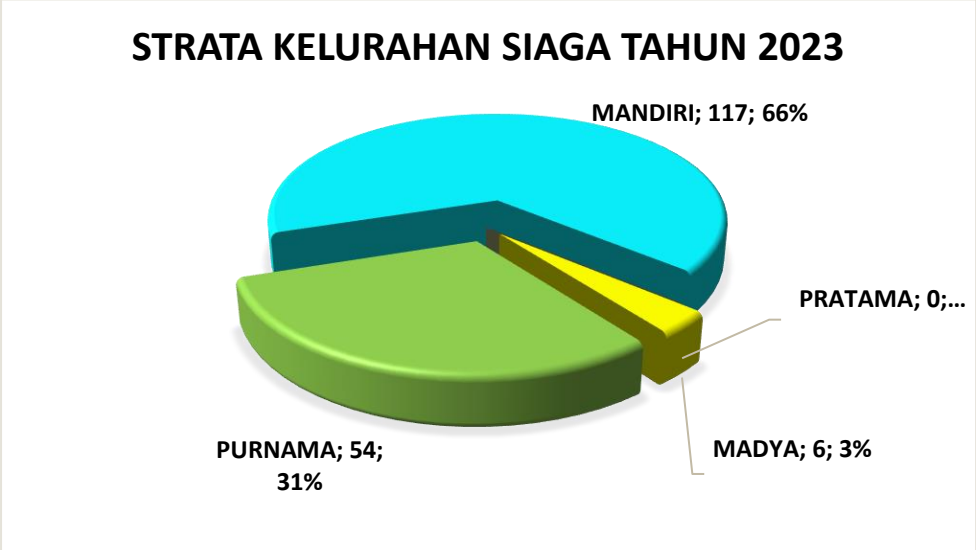

Lebih dari setengah kelurahan yang ada di Kota Semarang sebagai kelurahan siaga aktif yang berarti bahwa :

1. Penduduk wilayah dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar;
2. Penduduk melaksanakan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) yaitu aktig posyandu balita, aktif posyandu lansia, terdapat pos kesehatan pondok pesantren dan pos upaya kesehatan kerja (UKK)
3. Melaksanakan surveilance berbasis masyarakat;
4. Mampu memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan;
5. Masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

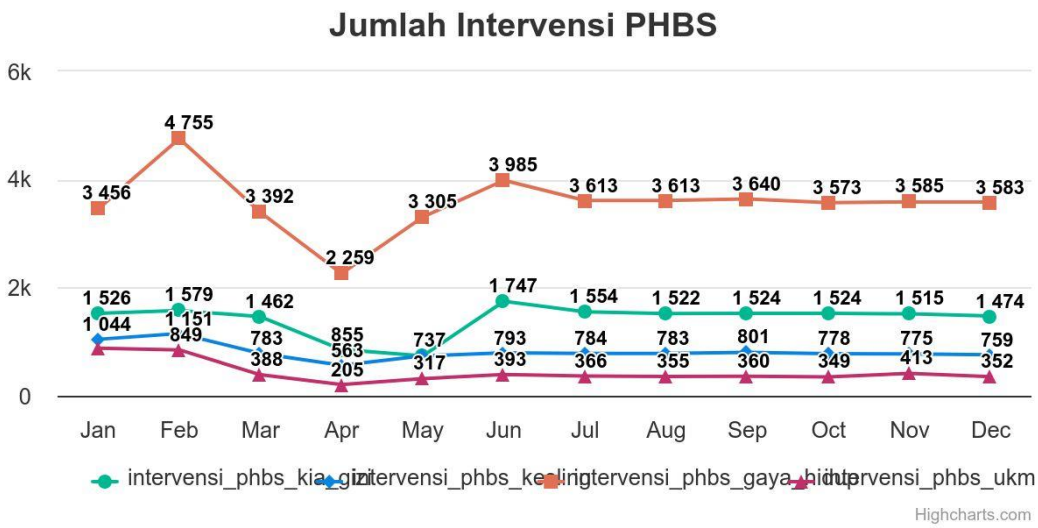

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pembentukan good governace dan clean government. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan sistem akuntailitas kinerja instansi pemerintah merupakan ringkasan sistematika dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 5 komponen penilaian dalam akuntabilitas kinerja, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15
4. Evaluasi internal dengan bobot 20
5. Capaian kinerja dengan bobot 20

Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penilaian akuntabilitas ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Perbandingan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021 sampai dengan target tahun 2023 sebagai berikut :

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Perencanaan Kinerja	24,73	23,10	24,90
2.	Pengukuran Kinerja	16,25	20,40	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	9,50	11,25	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,25	19,25	20,00
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	18,21	-	-
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		**73,94**	**74,01**	**78,65**
KATEGORI		**BB**	**BB**	**BB**

Penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan terhadap pencapaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 4,64 yaitu dari 74,01 menjadi 78,65.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi

Target sasaran adalah hasil akhir periode jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Semarang tertuang dalam Rencana Startegis (Renstra) 2021-2026.

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021-2026

Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023		Target Sasaran		
	Target	Realisasi	2024	2025	2026
Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	6,07	7,09	6,06	6,05	6,04
Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	71,33	79,85	71,32	71,31	71,30
Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,70	12,69	10,71	10,21	9,71
Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,34	1,36	1,37	1,40	1,43
Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	100	100	100
Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri [persentase]	22,60	66,10	23,16	23,73	24,30

Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023		Target Sasaran		
	Target	Realisasi	2024	2025	2026
Nilai AKIP [Nilai]	72,45	78,65	72,50	72,55	72,60

Target kinerja sasaran Dinas Kesehatan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penetapan indikator dan target sasaran didasarkan pada :

- Pencapaian indikator kinerja mampu memberikan feedback yang positif untuk peningkatan kinerja;
- Indikator dirumuskan agar mampu menunjukkan dampak atas perbaikan inisiatif yang dilakukan;
- Indikator mampu menunjukkan hasil atas perbaikan kinerja dan eksekusi startegi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang selain didasarkan pada pencapaian kinerja tahun sebelumnya, target nasional juga menjadi pertimbangan dalam penetapan dan evaluasi kinerja.

Sasaran Strategis 1 **Meningkatkan Upaya Kesehatan Yang Tercapai (*Accessible*), Terjangkau *(Affordable),* Dan Bermutu**					**Target Nasional Tahun 2023**
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	
1.	Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	71,33	79,85	88,01	194
2.	Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	6,07	7,09	83,20	17,6
3.	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,70	12,69	100	-

WHO menyatakan hampir 95% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah kebawah pada tahun 2020. Di tahun 2023 karateristik ibu meninggal di Kota Semarang 53% tidak bekerja dengan pendidikan 80% SMA. Usia ibu lebih dari 35 tahun merupakan salah satu faktor resiko kematian ibu. Rata-rata ibu maternal yang meninggal memiliki 3 sampai 5 resiko.

Sasaran Strategis II Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan					Target Nasional tahun 2023
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	
1.	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,37	1,36	99,27%	
2.	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	100%	5.000 fasyankes

Proyek prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2020-2026 salah satunya adalah Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan dengan target indikator persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%. Kota Semarang pada tahun 2023 telah memenuhi ketersediaan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan tenaga ATLM.

Brenchmarking Perhitungan Rasio Tenaga Kesehatan di Dunia

Brenchmarking untuk tenaga kesehatan dokter, dokter gigi terhadap 7 negara Britania Raya (United Kingdom – UK), Amerika Serikat (AS), Norwegia, Thailand, Singapura, dan India.

Rasio dokter dan dokter gigi per 1000 penduduk

Jenis tenaga kesehatan	UK	US	Australia	Norwegia	Thailand	Singapura	India
Dokter	3,00	2,61	4,13	5,05	0,95	2,60	0,74
Dokter Gigi	0,54	0,61	0,62	0,90	0,27	0,40	0,16

Sumber data : Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar

Target 2023	Realisasi 2023	Target RPJMN 2020-2026 Tahun 2023
40%	43,53%	5.000 fasyankes

Proyek prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2020-2026 Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan kegiatan Pelayanan kefarmasian sesuai standar fasyankes, indikatornya adalah jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Pada tahun 2023 di targetkan 5.000 fasyankes di provinsi/kabupaten/kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET PADA RENSTRA TH 2023	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA								
1	Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	1	Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	71,33	71,33	79,85	95,3	5,60
		2	Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	6,07	6,07	7,09	6,04	67,25
		3	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,70	12,70	12,69	-	11,65
			Rata-rata capaian sasaran 1 : 90,40%				**Tinggi**	
2	Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	1	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,37	1,37	1,36	-	2,60
		2	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian sasaran 2 : 99,63%				**Sangat Tinggi**	
3	Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	1	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri [persentase]	48,59	48,59	66,10	45,91	56,5
			Rata-rata capaian sasaran 3 : 136%				**Sangat Tinggi**	
4	Meningkatkan kualitas	1	Nilai AKIP	72,45	72,45	78,65	74,01	74,01

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TH 2023	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kinerja pelayanan perangkat daerah	[Nilai]					
		Rata-rata capaian sasaran 4 : 108,56%				**Sangat Tinggi**	
		Total rata-rata capaian sasaran : 102,15				**Sangat Tinggi**	

Sumber data : Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang 2021-2026

Target pencapaian indikator Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi tahun 2023 belum tercapai hal ini disebabkan karena :

1. Keberhasilan KB yang berdampak menurunnya kelahiran hidup;
2. Dampak perubahan iklim (elnino) menyebabkan pre eklampsia, berat badan bayi lahir rendah, premature sehingga beresiko menyebabkan kematian bayi maupun ibu;
3. Perubahan gaya hidup (perilaku) menyebabkan jumlah ibu hamil usia kurang dari 20 tahun meningkat hal ini merupakan bumil beresiko tinggi;
4. Transisi demografi mengacu tingkat kelahiran dan kematian mempengaruhi komposisi penduduk. Angka mortalitas lebih tinggi dibandingkan angka fertilitas, maka akan beengaruh negatif terhadap demografi.

Upaya promotif dan preventif yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu adalah

1. Melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan penyumbang kematian ibu;
2. Optimalisasi posyandu dan kelas ibu hamil;
3. Melakukan rujukan terhadap ibu hamil obesitas merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
4. Promosi high risk pregnancy dan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ke masyarakat.

Selain itu dilakukan juga beberapa upaya pencegahan kematian bayi dilakukan melalui

1. Edukasi dan pemeriksaan catin termasuk pemeriksaan Hb, KEK, gula darah;
2. Pendampingan catin beresiko;

3. Deteksi dini faktor resiko kehamilan secara detail termasuk riwayat penyakit keluarga;
4. Pemberian asi ekslusif;
5. Pendampingan bayi BBLR, PB< 47 cm;
6. Monitoring ibu hmail KEK dan Anemi
7. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi oleh kader TPK, PKK, FKK;
8. Pemberian PMT ibu hamil KEK dan balita stunting

Inovasi yang LAWANG SEWU diciptakan untuk menangani penyakit tidak menular guna menekan angka morbiditas masyarakat. Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (LAWANG SEWU) bertujuan untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif hingga preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas untuk menurunkan beban pembiyaan layanan kesehatan akibat penyakit, melalui :

1. Aktivitas fisik dengan VALAS (Virtual Activity Link dengan SIPGAR) dan Prambanan (Pergi Pasar Berangkat Kantor Biasakan jalan);
2. Kesehatan Lingkungan dengan inovasi UCOK BABA untuk uji dan skrining bahan air dan bahan makanan, POLKE (PIRT-BPOM-Like sehat-Hygien Sanitasi) didukung SIKEMPLING (Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan);
3. Pangan sehat Bergizi dengan LANGIT SEMARANG (Langkah Aktif Terpadu Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang dengan URBAN FARMING) dan UNGARAN (Ubah Pekarangan kosong dengan URBAN FARMING);
4. Deteksi Dini melalui BAITUSSALAM (Bangkitkan Imun dan Taqwa untuk Semarang Afiat, Lincah Anti Demensia), PERKASA (Pemeriksaan Kesehatan Berkala Cegah Obesitas), PANGERAN CHARLES (Paket Kesehatan Pemeriksaan Covid 19, Hepatitis, IVA Test, Diabetus dan HIV), didukung oleh PAK EDI (Pemeriksaan Kesehatan dan Deteksi Dini) dan DEMAK (Daftar Request Makanan dari start-up);
5. EDUKASI PHBS dengan RAJA SALMAN (Bersama sama menjaga Kota Semarang makin Sehat)

Selain itu perlu juga melakukan **GAS POL** Cegah Obesitas Dengan Atur Pola Makan Dan Olahraga. Sebuah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, meningkatkan imunitas pegawai dan meningkatkan angka harapan hidup. Output yang diharapkan angka overweight dan obesitas berkurang

Permasalahan yang dihadapi terkait sumber daya manusia kesehatan adalah :

1. Masih adanya rangkap pekerjaan atau dobel Job, misalnya perawat menjadi bendahara dan lain-lain;

2. Belum semua puskesmas mempunyai 2 (dua) tenaga tambahan yang wajib di puskesmas (keuangan dan IT);
3. Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai dengan renbut;
4. Keterbatasan pelatihan, baik dari segi anggaran, waktu maupun kesempatan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan guna mencapai sasaran II perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan diantaranya :

1. Rekrutmen tenaga melalui BLUD, PPPK;
2. Rencana kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan tinggi, dengan bentuk kegiatan magang/ praktik kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Seleksi peserta diklat/uji kompetensi;
4. Pengiriman calon peserta diklat bekerjasama dengan badan diklat Kota Semarang;
5. Monev peserta pasca diklat;
6. Pelaksanaan Uji kompetensi;
7. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan;
8. Monitoring Perijinan SDMK di Fasyankes;
9. Pembinaan Organisasi Profesi Nakes.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam ketahanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan alat kesehatan. Di tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan sebagai berikut :

1. Kebutuhan *Cold room* pada Instalasi farmasi merupakan dropping dari kementrian kesehatan;
2. Kebutuhan alat kesehatan pada instalasi farmasi berupa thermometer, thermohygrometer, coldchain/ vaccin storage;
3. Kebutuhan alat kesehatan di laboratorium kesehatan berupa pemeriksaan minyak lemak, pengujian kandungan gizi pada makanan minuman dan kosmetik serta pengujian mikrobiologi pada makanan dan minuman.

Beberapa upaya yang ditargetkan dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian upaya kesehatan berbasis masyarakat , diantaranya :

1. Optimalisasi kader kesehatan atau tenaga non kesehatan yang memiliki ketrampilan tertentu;
2. Mendorong keaktifan posyandu dan UKBM;
3. Menggali sumber dana lainnya selain dari pemerintah desa/ kelurahan;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan memperluas peran aktif organisasi masyarakat;
5. Peningkatan pencapaian rumah tangga sehat.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang diantaranya :

1. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2023;
2. Memberikan perbandingan antara seluruh realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran	indikator sasaran	Volume			CSS	ANGGARAN		AA X CSS	(AA X CSS) - RA
		Target	Realiasasi	%		ALOKASI (AA)	REALISASI (RA)		
Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (accesible), terjangkau (affordable), dan bermutu	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	6,07	7,09	83,20%	90,44%	150.207.393.484	142.068.767.634	135.852.725.239	6.216.042.395
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	71,33	79,85	88,06%					
	Angka Morbiditas (per 1000 Penduduk)	12,70	12,69	100,08%					
meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	1,37	1,36	99,27%	99,27%	1.485.198.133	1.446.378.010	1.474.357.271	27.979.261
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar (persentase)	100%	100%	100,00%	100,00%	580.319.892	558.044.695	580.319.892	22.275.197
meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	proporsi kelurahan siaga aktif mandiri (persentase)	48,59%	66,10%	136,04%	136,04%	888.412.565	862.859.375	1.208.562.884	345.703.509
meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	72,45	78,65	108,56%	108,56%	211.253.140.771	205.948.283.146	229.331.394.364	23.383.111.218

Sasaran	indikator sasaran	Volume			CSS	ANGGARAN		AA X CSS	(AA X CSS) - RA
		Target	Realiasasi	%		ALOKASI (AA)	REALISASI (RA)		
TOTAL						364.414.464.845	350.884.332.860	368.447.359.649	17.563.026.789
EFISIENSI									**4,77%**

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut terdapat nilai inefisiensi pada capaian sasaran meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (accesible), terjangkau (affordable), dan bermutu pada indikator angka kematian bayi sebesar -4,58%. Disisi lain efisiensi yang sangat signifikan pada pencapaian sasaran meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan sebesar 28,60%. Namun demikian nilai efisiensi maupun inefisiensi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai yang sebenarnya karena masih menggunakan realisasi anggaran program.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALIASASI	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	1	Angka Kematian Ibu [per 1000 KH]	71,33	79,85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator : Persentase layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai standar	100	100	100%
		2	Angka Kematian Bayi [per 100.000 KH]	6,07	7,09				
		3	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	12,70	12,69				
2	Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	1	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,37	1,36	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Indikator : Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	100	100%
		2	Proporsi pelayanan kefarmasian dipuskesmas sesuai standar [persentase]	100	100	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Indikator : Persentase fasilitas	40	43,53	108,8%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALIASASI	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar			
3	Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	1	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri [persentase]	48,59	66,10	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	100	100
4	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1	Nilai AKIP [Nilai]	72,45	78,65	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Indikator : Persentase perencanan dan pelaporan kinerja OPD	100	100	100
						Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	100	100
						Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	100	100	100

Untuk mencapai sasaran I dilakukan melalui strategi peningkatan upaya kesehatan secara terpadu dan peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan/ subkegiatan:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

   Subkegiatan :

   a. Pembangunan Puskesmas;
   b. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
   c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
f. Pengadaan Obat, Vaksin;
g. Pengadaan Bahan Habis Pakai;
h. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Subkegiatan:

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV;
m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
p. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;
r. Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
s. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
t. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
u. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat;
v. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai sasaran II dilakukan melalui starategi peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan industri pangan rumah tangga dan peningkatan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan meliputi Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan/ subkegiatan:

1. Pemberiaan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
   Subkegiatan :
   a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
   b) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
   Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
3. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota;
   Subkegiatan:
   a) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
   b) Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan.
4. Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   Subkegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan.

Untuk mencapai sasaran III dilakukan melalui strategi peningkatan pemberdayaan bidang kesehatan masyarakat meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Untuk mencapai sasaran IV dilakukan melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD;
2. penyediaan dokumen rencana kerja dan rencana anggaran OPD;
3. penyelenggaraan pelayanan BLUD puskesmas;
4. penyediaan kebutuhan rumah tangga OPD;
5. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor OPD;
6. penyediaan kebutuhan jasa kantor OPD;
7. penyelenggaraan pemeliharaan aset OPD;

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2023 sebesar :

(NAMA OPD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS KESEHATAN	464.949.963.557	449.495.114.334	96,68
JUMLAH	**464.949.963.557**	**449.495.114.334**	**96,68**

Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN WAJIB KESEHATAN				
DINAS KESEHATAN		**464.949.963.557**	**449.495.114.334**	**96,68**
02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**150.207.393.484**	**142.068.767.634**	**94,58**
2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**45.580.931.033**	**41.983.971.060**	**92,11**
01.05	Pengembangan Rumah Sakit	2.314.612.226	2.167.104.537	93,63
01.06	Pengembangan Puskesmas	12.310.081.194	9.976.411.505	81,04

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.729.350.000	2.612.917.798	95,73
01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.900.024.490	4.620.650.978	94,30
01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.467.966.690	1.457.145.000	99,26
01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.947.345.321	9.453.399.356	95,03
01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	6.952.459.112	6.935.353.046	99,75
01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.959.092.000	4.760.988.840	96,01
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**94.923.664.091**	**90.928.857.289**	**95,79**
02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.372.500	69.199.850	99,75
02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93.951.520	93.901.525	99,95
02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93.212.750	93.035.000	99,81
02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46.237.500	46.009.000	99,51
02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	137.556.885	135.727.800	98,67
02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	74.906.892	68.344.149	91,24
02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.063.177	30.723.625	98,91
02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	58.925.918	58.471.000	99,23
02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.887.629.333	1.343.170.000	71,16
02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48.646.863	48.575.400	99,85
02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.794.277.144	2.785.532.713	99,69
02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	809.873.712	726.427.578	89,70
02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12.330.000	12.329.975	100,00
02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana	30.520.000	30.505.500	99,95
02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.176.915.033	16.619.853.340	86,67

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	77.414.100	77.388.180	99,97
02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	322.209.190	290.443.825	90,14
02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	188.038.907	185.043.725	98,41
02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	22.275.000	18.675.000	83,84
02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	193.323.746	193.323.375	100,00
02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	107.747.120	107.747.120	100,00
02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	25.490.745	25.464.200	99,90
02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.689.522.748	1.631.310.465	96,55
02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.178.066.703	63.698.917.393	99,25
02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	955.847.446	908.555.690	95,05
02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	525.270.744	452.909.600	86,22
02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	704.762.000	661.995.511	93,93
02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.512.500	8.467.600	99,47
02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	192.024.664	188.726.700	98,28
02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Teadu (SPGDT)	256.210.310	212.198.500	82,82
02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.757.941	40.956.500	95,79
02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	39.487.500	35.887.200	90,88
02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	29.283.500	29.040.250	99,17
2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**2.246.979.986**	**2.136.456.495**	**95,08**
03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	900.513.380	884.946.575	98,27
03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	900.513.380	884.946.575	98,27
03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	796.195.430	741.746.420	93,16
2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas**	**7.455.818.374**	**7.019.482.790**	**94,15**

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.900.000	9.700.000	97,98
04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.650.918.374	4.251.774.416	91,42
04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.795.000.000	2.758.008.374	98,68
03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1.485.198.133**	**1.446.378.010**	**97,39**
2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**455.983.803**	**448.694.814**	**98,40**
02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.925.000	17.850.000	99,58
02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	59.671.200	57.390.111	96,18
02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	378.387.603	373.454.703	98,70
2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1.029.214.330	997.683.196	96,94
03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.029.214.330	997.683.196	96,94
04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**580.319.892**	**558.044.695**	**96,16**
2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**219.373.405**	**215.410.575**	**98,19**
01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	219.373.405	215.410.575	98,19
2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk**	**129.738.663**	**123.088.220**	**94,87**

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	129.738.663	123.088.220	94,87
2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**129.738.663**	**123.088.220**	**94,87**
06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	129.738.663	123.088.220	94,87
05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**888.412.565**	**862.859.375**	**97,12**
2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**125.679.680**	**121.095.275**	**96,35**
01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.679.680	121.095.275	96,35
2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**762.732.885**	**741.764.100**	**97,25**
03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	762.732.885	741.764.100	97,25
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**211.253.140.771**	**205.948.283.146**	**97,49**
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.396.080**	**38.487.325**	**97,69**
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.108.800	5.549.200	90,84
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.188.500	8.188.500	100,00
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.734.400	8.651.150	99,05

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.940.820	2.689.575	91,46
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.486.720	3.473.175	99,61
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.936.840	9.935.725	99,99
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**197.569.728.850**	**193.927.351.351**	**98,16**
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	197.020.852.850	193.400.044.711	98,16
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538.760.000	517.191.000	96,00
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.372.000	3.372.000	100,00
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.372.000	3.371.640	99,99
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.372.000	3.372.000	100,00
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.948.579.183**	**3.352.754.286**	**84,91**
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.091.000	23.009.500	99,65
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.456.770	92.652.033	99,14
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.736.940	144.482.015	73,44
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.630.000	3.444.730	94,90
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.128.720.363	809.696.008	71,74
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.502.944.110	2.279.470.000	91,07
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.452.738.840**	**2.396.466.026**	**97,71**
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.452.738.840	2.396.466.026	97,71
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.134.564.194**	**2.612.580.075**	**83,35**
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	795.574.384	649.435.112	81,63
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.338.989.810	1.963.144.963	83,93

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.108.133.624**	**3.620.644.083**	**88,13**
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.572.720	218.946.731	96,63
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.038.703.580	1.927.678.645	94,55
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	740.912.200	421.553.892	56,90
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.018.730.124	1.018.078.865	99,94
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.215.000	34.385.950	41,32
2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**78.813.108.873**	**77.059.960.470**	**97,78**
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Poncol)	1.930.267.112	1.897.718.158	98,31
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Miroto)	1.450.439.363	1.438.023.108	99,14
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bandarharjo)	2.588.416.355	2.577.646.878	99,58
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bulu Lor)	1.947.591.815	1.937.913.840	99,50
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Halmahera)	2.114.958.476	2.088.935.966	98,77
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bugangan)	1.498.556.021	1.457.860.547	97,28
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karangdoro)	2.860.352.499	2.841.186.372	99,33
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandanaran)	2.084.996.482	2.075.498.936	99,54
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lamper Tengah)	1.425.259.523	1.420.544.731	99,67
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karangayu)	1.300.803.479	1.251.717.250	96,23
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lebdosari)	1.578.346.514	1.517.561.997	96,15

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manyaran)	1.628.424.096	1.615.369.004	99,20
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Krobokan)	1.367.002.993	1.355.982.771	99,19
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ngemplak Simongan)	1.358.434.176	1.358.291.423	99,99
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayamsari)	2.980.800.061	2.979.803.406	99,97
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Candilama)	1.626.174.814	1.593.561.851	97,99
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kagok)	1.646.800.779	1.617.460.345	98,22
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pegandan)	1.824.963.265	1.798.203.983	98,53
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Genuk)	2.038.268.255	2.034.201.498	99,80
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bangetayu)	3.620.538.179	3.560.849.545	98,35
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tlogosari Wetan)	3.505.569.008	3.414.540.201	97,40
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tlogosari Kulon)	2.988.302.825	2.941.365.754	98,43
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kedungmundu)	4.446.618.585	4.440.615.541	99,86
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rowosari)	2.598.870.063	2.412.982.201	92,85
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ngesrep)	1.743.751.878	1.720.774.841	98,68
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Padangsari)	2.047.521.039	2.033.289.317	99,30
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Srondol)	1.564.544.595	1.559.674.140	99,69
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pudak Payung)	1.418.220.987	1.417.030.147	99,92

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gunungpati)	3.052.767.113	3.015.208.593	98,77
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mijen)	2.904.061.223	2.810.704.442	96,79
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karangmalang)	1.596.311.095	1.563.481.182	97,94
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Tambakaji)	1.489.402.420	1.489.365.147	100,00
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Purwoyoso)	1.276.418.867	1.253.907.085	98,24
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ngaliyan)	3.157.648.758	3.064.921.015	97,06
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mangkang)	1.473.878.560	1.434.261.627	97,31
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Karanganyar)	1.464.662.651	1.464.215.651	99,97
10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sekaran)	1.761.164.949	1.734.939.510	98,51

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKj-IP Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan rencana dan target yang telah ditetapkan, dengan realisasi yang telah dicapai.

Secara umum capaian sasaran stategis menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat tinggi, mengalami perkembangan dan peningkatan capaian kinerja secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya 102,17% dari target. Rekapitulasi capaian kinerja urusan kesehatan pada tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut :

<table>
<tr><td colspan="4">Visi : TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA</td></tr>
<tr><td colspan="4">Misi : MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td>SASARAN</td><td colspan="2">STRATEGI</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</td><td>Sasaran I:

Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (accesible), terjangkau (affordable), dan bermutu</td><td colspan="2">1. Peningkatan upaya kesehatan secara terpadu;
2. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.</td></tr>
<tr><td>PROGRAM</td><td>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</td><td>PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN</td></tr>
<tr><td>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</td><td>90,40%</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>Rata-rata Capaian sasaran</td><td>90,40%</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>Sasaran II :

Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan</td><td colspan="2">1. Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan industri pangan rumah tangga</td></tr>
</table>

Visi : TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA			
Misi : MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	
		2. Peningkatan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	99,27%	Sangat Tinggi
	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian sasaran	**99,63%**	**Sangat Tinggi**
	Sasaran III: Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Peningkatan pemberdayaan bidang kesehatan masyarakat	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	136,03%	Sangat tinggi
	Rata-rata Capaian sasaran	**136,03%**	**Sangat Tinggi**
	Sasaran IV: Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	
	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PENILAIAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN
	Program penunjangn urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	108,56%	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian sasaran	**108,56%**	**Sangat Tinggi**
	Total Rata-Rata Capaian Sasaran	**102,15%**	**Sangat Tinggi**

B. UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalah layanan Dinas Kesehatan di Kota Semarang guna peningkatan pencapaian kinerja adalah melalui:

1. Intervensi masalah kesehatan tidak lagi berbasis program melainkan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup;
2. Intervensi pada *host*, *agent* dan *enviroment* melalui :
   a. Penguatan screening pada masyarakat dengan intervensi personal MENTARRI SEHAT NUSANTARA yaitu upaya untuk mendeteksi adanya gejala, potensi dan

tanda-tanda dari suatu penaykit tertentu sehingga dapat dilakukan diagnosis dan penanganan secara dini melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh *(medical check up);*

b. Intervensi wilayah melalui CKRAWALA BUANA yaitu melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat dengan sistem kerentanan wilayah kesehatan berbasis analitik data pelayanan;
c. Intervensi kesehatan lingkungan melalui program PAPANDAYAN upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan didukung lintas sektoral dan peran masyarakat Kota Semarang dengan cara meningkatkan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan saran, pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan
d. Penguatan *Health Community* yaitu upaya bergerak bersama dalam menghadapi *issuel* masalah masyarakat dengan menekankan pada kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi demi terciptanya masyarakat yang sehat dan kualitas hidup yang baik (MAHAPATIH GAJAHMADA) dengan prinsip mengembangkan sistem manajemen, penciptaan inovasi dan pengembangan sistem kerja dan pelayanan.

3. Penguatan transformasi kesehatan yang mencakup 6 (enam) pilar transformasi yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumberdaya manusia kesehatan dan transformasi digital kesehatan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN

Dr. dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD, FINASIM